Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 9 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

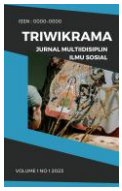

PARADIPLOMASI MULTI-SEKTOR DALAM KERJA SAMA SISTER CITY: STUDI KASUS TANGERANG SELATAN DAN DAEJEON

Freesia Aryunia Zafilia Basalama Luhukay[1], Nicholaus Harrison[2], Nayla Rizky[3], Agha Pradipta[4], Valin Audria Fajar[5]
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2025
Revised Juni 2025
Accepted Juni 2025
Available online Bulan Tahun

2310412208@mahasiswa.upnvj.ac.id[1];
2310412138@mahasiswa.upnvj.ac.id[2];
2310412184@mahasiswa.upnvj.ac.id[3];
2310412008@mahasiswa.upnvj.ac.id[4];
2310412224@mahasiswa.upnvj.ac.id[5]

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak. Paradiplomasi menjadi strategi penting dalam memperluas peran pemerintah daerah dalam hubungan internasional, salah satunya melalui skema kerja sama sister city. Artikel ini mengkaji bentuk, strategi, serta tantangan kerja sama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kota Daejeon, Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap karyawan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Data yang diperoleh kemudian divalidasi melalui triangulasi dengan jurnal ilmiah terdahulu dan dokumen resmi pemerintah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut masih bersifat simbolik dan inspiratif, belum mencapai tahap implementatif secara maksimal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan ekosistem kelembagaan, serta hambatan regulasi nasional. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap menjadikan kerja sama ini sebagai sarana *policy learning* yang adaptif dan bertahap. Artikel ini merekomendasikan perlunya pemetaan kebutuhan yang lebih strategis, integrasi program ke dalam dokumen perencanaan daerah, serta penguatan evaluasi lintas sektor untuk mengoptimalkan manfaat kerja sama paradiplomasi di masa depan.
Kata Kunci: Paradiplomasi; *Sister City*; Desentralisasi; Pemerintah Daerah; Tangerang Selatan; Daejeon.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, pemerintah daerah semakin terdorong untuk mengambil peran aktif dalam hubungan internasional. Ketergantungan pada pemerintah pusat sebagai satu-satunya aktor dalam diplomasi negara mulai bergeser, seiring dengan meningkatnya peran kota dan pemerintah lokal dalam menjalin kerja sama lintas batas negara. Konsep paradiplomasi, yakni keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri untuk kepentingan lokal, semakin relevan, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan yang bersifat lintas-sektoral seperti urbanisasi, perubahan iklim, hingga transformasi digital.

Paradiplomasi bukan hanya menjadi bentuk pelebaran peran pemerintah daerah, tetapi juga menjadi strategi untuk mempercepat proses pembangunan lokal melalui pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan teknologi. Dalam kerangka ini, kerja sama *sister city* muncul sebagai salah satu mekanisme formal yang digunakan oleh kota-kota di berbagai negara

untuk menjalin kolaborasi jangka panjang di berbagai sektor. Melalui skema ini, dua kota dari negara yang berbeda dapat membangun hubungan berbasis kesetaraan administratif, kesamaan permasalahan, dan potensi sumber daya yang saling melengkapi.

Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota baru hasil pemekaran di Provinsi Banten menunjukkan antusiasme dalam membangun jejaring internasional guna mempercepat transformasi wilayahnya. Sebagai kota yang tengah mencari identitas dan arah pembangunan, Tangerang Selatan memandang penting untuk belajar dari kota-kota yang lebih maju, baik dalam hal teknologi, tata kelola, maupun pembangunan sumber daya manusia. Salah satu kerja sama internasional yang menonjol adalah hubungan persahabatan (*friendship cooperation*) dengan Kota Daejeon, Korea Selatan.

Daejeon dikenal sebagai pusat riset dan teknologi di Korea Selatan, serta telah berhasil mengembangkan konsep *smart city* secara menyeluruh. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi Tangerang Selatan untuk melakukan studi banding dan penjajakan kerja sama sejak 2014. Inisiatif tersebut kemudian berkembang menjadi penandatanganan *Letter of Intent* pada 2015 oleh Walikota Tangerang Selatan saat itu, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di tahun 2016. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup riset dan teknologi, pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pertukaran budaya.

Meskipun belum mencapai tahap resmi sebagai *sister city*, kerja sama Tangerang Selatan–Daejeon secara fungsional sudah mengarah pada bentuk paradiplomasi multi-sektor. Aktivitas seperti pertukaran pemuda, studi kebijakan *smart city*, hingga kerja sama di bidang pertanian urban dan pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai aspek pembangunan kota. Bahkan dalam beberapa kasus, inisiatif ini dijalankan secara langsung oleh pemerintah daerah tanpa keterlibatan pihak ketiga, sejalan dengan regulasi yang membatasi bentuk kerja sama internasional pada level pemerintah-ke-pemerintah.

Namun, tantangan tetap hadir dalam implementasi kerja sama tersebut. Kendala regulasi, keterbatasan kewenangan daerah, dan perbedaan kapabilitas antara kedua kota menjadi penghambat nyata dalam mendorong hasil kerja sama yang lebih konkret. Meski sudah ada aktivitas kunjungan dan pertukaran pengetahuan, dampak yang dirasakan masyarakat secara luas belum signifikan. Ini menjadi catatan penting dalam mengevaluasi efektivitas model paradiplomasi yang dijalankan oleh pemerintah kota di Indonesia.

Strategi yang ditempuh oleh Tangerang Selatan untuk menyiasati keterbatasan tersebut adalah dengan mengadopsi nilai-nilai atau praktik terbaik dari kota mitra dan menyesuaikannya dengan konteks lokal. Pendekatan ini menegaskan bahwa kerja sama *sister city* tidak sekadar tentang pencitraan internasional, tetapi menjadi sarana aktual untuk belajar, berinovasi, dan memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Pemerintah kota juga berusaha memperluas kerja sama dengan kota-kota lain, termasuk menjajaki kolaborasi di bidang pertanian modern dan pendidikan dengan kota dari Malaysia.

Dengan mengkaji kerja sama antara Tangerang Selatan dan Daejeon, kita dapat memahami lebih jauh dinamika paradiplomasi dalam konteks kota berkembang. Kerja sama

ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mencoba menavigasi hubungan internasional di tengah keterbatasan regulasi dan sumber daya, serta bagaimana mereka membangun diplomasi setara berdasarkan potensi lokal dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Hal ini penting untuk ditelaah, terutama dalam konteks Indonesia yang tengah mendorong desentralisasi dan otonomi daerah sebagai pilar pembangunan nasional.

Oleh karena itu, studi mengenai kerja sama antara Tangerang Selatan dan Daejeon tidak hanya relevan untuk melihat praktik paradiplomasi di tingkat lokal, tetapi juga sebagai cermin dari tantangan dan peluang dalam membangun relasi internasional yang lebih partisipatif, fleksibel, dan berdampak nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk, strategi, dan hasil kerja sama tersebut dijalankan, serta apa maknanya bagi penguatan kapasitas diplomasi daerah di era globalisasi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama *sister city* sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi, strategi implementasi, serta kualitas sumber daya manusia. Mukti (2013) mencatat bahwa lebih dari 60% pemerintah daerah di Indonesia mengalami keterbatasan dalam menjalin kerja sama luar negeri akibat belum adanya regulasi teknis yang mendukung secara optimal. Penelitian oleh Anggia dkk. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama *smart city* antara kota di Indonesia dan Jepang didukung oleh perencanaan strategis dan keterlibatan aktif pemerintah kota, yang mampu mendorong peningkatan efisiensi layanan publik hingga 35%. Sementara itu, studi oleh Septiarika & Suryanjari (2020) mencatat bahwa kerja sama ekonomi antar kota dapat meningkatkan volume perdagangan lokal sebesar 20% dalam dua tahun pelaksanaan.

Faktor sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam kerja sama antar kota. Adinda dkk. (2020) melaporkan bahwa pelatihan teknis dan penguasaan bahasa asing bagi aparatur pemerintah daerah berkontribusi terhadap efektivitas implementasi program kerja sama hingga 45%. Albert dkk. (2018) menambahkan bahwa pelaksanaan evaluasi rutin setiap tahun dapat meningkatkan keberlanjutan kerja sama hingga tiga kali lipat dibanding kota-kota yang tidak melaksanakan evaluasi. Di sisi lain, studi oleh Putri & Adnan (2017) mengungkapkan bahwa sekitar 70% kerja sama *sister city* yang gagal disebabkan oleh miskomunikasi, minimnya tindak lanjut, serta absennya mekanisme monitoring yang terstruktur.

Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada keberhasilan kerja sama antar kota dengan indikator yang terukur secara ekonomi maupun teknologi, dan umumnya melibatkan kota-kota besar dengan kapasitas kelembagaan yang kuat. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah implementasi kerja sama *sister city* di kota berkembang seperti Tangerang Selatan, yang baru merintis pembangunan kota dan menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, kewenangan, dan pembiayaan. Padahal, berdasarkan hasil wawancara, kerja sama antara Kota Tangerang Selatan dan Daejeon tidak sepenuhnya terealisasi secara optimal karena adanya keterbatasan dalam tindak lanjut, perbedaan kapabilitas antar kota, serta hambatan administratif yang belum diantisipasi secara strategis.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait bagaimana paradiplomasi *sister city* dijalankan oleh kota-kota dengan kapasitas terbatas, serta bagaimana adaptasi kebijakan dan pembelajaran lintas kota dilakukan secara bertahap namun

berkelanjutan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah dinamika kerja sama antara Tangerang Selatan dan Daejeon dalam kerangka paradiplomasi multi-sektor, termasuk pendekatan strategi adaptif, pemaknaan pemerintah lokal terhadap kerja sama, serta peluang dan hambatan yang dihadapi selama periode pelaksanaan kerja sama.

1.2 Urgensi Penelitian

Kerja sama *sister city* merupakan salah satu bentuk paradiplomasi yang dapat mendorong pembangunan daerah melalui pertukaran pengetahuan, teknologi, budaya, dan sumber daya. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan regulasi, kewenangan daerah, hingga perbedaan kapasitas antar mitra kerja sama. Studi mengenai *sister city* umumnya berfokus pada kota besar atau daerah yang sudah mapan, sementara kerja sama antar kota berkembang seperti Tangerang Selatan dan Daejeon masih jarang dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana bentuk, strategi, serta tantangan kerja sama *sister city* dalam konteks multi-sektor yang melibatkan kota berkembang, dan untuk mengevaluasi sejauh mana kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi pembangunan lokal.

TINJAUAN LITERATUR

1. Paradiplomasi

a. Pengertian

Paradiplomasi merujuk pada keterlibatan pemerintah daerah dalam aktivitas hubungan luar negeri, biasanya untuk kepentingan pembangunan lokal. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh peneliti hubungan internasional, Ivo Duchacek, yang menyatakan bahwa paradiplomasi adalah kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh entitas subnasional dalam sistem internasional yang didominasi oleh negara berdaulat (Duchacek, 1984). Menurut Cornago (2010), paradiplomasi tidak semata-mata bertujuan memperluas jaringan internasional, tetapi juga menjadi strategi daerah dalam merespons isu-isu global yang berdampak langsung terhadap wilayah mereka.

b. Jenis Paradiplomasi

Paradiplomasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis berdasarkan bentuk dan orientasi kerja samanya. Pertama, kerja sama subnasional dalam negeri (kerja sama daerah provinsi dan lokal/KSDPL), yakni kerja sama antara dua daerah dalam satu negara. Kedua, kerja sama subnasional luar negeri (kerja sama daerah provinsi dan luar negeri/KSDPK), yaitu kerja sama antara pemerintah daerah di satu negara dengan entitas subnasional di negara lain. Ketiga, kerja sama subnasional global (kerja sama daerah dengan dunia/KSDD), yaitu partisipasi pemerintah daerah dalam forum atau organisasi internasional tanpa keterikatan langsung dengan aktor negara (Keating, 1999).

Paradiplomasi memberi ruang otonom bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama internasional dalam batas kewenangan yang diatur oleh negara asalnya. Namun,

bentuk implementasinya sering kali terbatas pada bentuk-bentuk kerja sama non-politik seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan lingkungan hidup (Lecours, 2008).

2. *Sister City*

Konsep *sister city* atau kota kembar merupakan salah satu bentuk kerja sama formal yang banyak digunakan dalam praktik paradiplomasi. Menurut Clarke (2009), *sister city* adalah kemitraan resmi antara dua kota dari negara yang berbeda, yang bertujuan untuk membangun pemahaman budaya, ekonomi, serta mempererat hubungan antar komunitas lokal. Skema ini biasanya ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan dijalankan dalam bentuk pertukaran program budaya, pendidikan, teknologi, atau pengembangan kota.

Pada dasarnya, kerja sama *sister city* menekankan prinsip kesetaraan administratif antar pemerintah daerah. Tidak seperti hubungan diplomatik antarnegara, kerja sama ini bersifat horizontal dan fleksibel. Melalui mekanisme ini, kota-kota yang memiliki kesamaan tantangan atau potensi dapat berbagi pengetahuan serta memperluas akses terhadap inovasi pembangunan (Nugent, 2003).

3. Desentralisasi

a. Pengertian

Desentralisasi merupakan proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Menurut Rondinelli (1981), desentralisasi mencakup dimensi politik, administratif, dan fiskal yang memungkinkan daerah memiliki keleluasaan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan lokal secara mandiri.

Desentralisasi berbeda dengan sekadar dekonsentrasi atau delegasi, karena memberikan kewenangan substantif kepada pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan sebagian aspek hubungan luar negeri yang tidak bersifat kedaulatan. Smith (1985) menekankan bahwa desentralisasi menjadi bagian dari modernisasi pemerintahan dalam merespons kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan efisien.

b. Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Pasal 361 ayat (1) UU 23/2014 disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama luar negeri dengan pemerintah daerah atau lembaga di negara lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini membuka ruang bagi praktik paradiplomasi, selama tetap dalam pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah di Indonesia memiliki legitimasi hukum untuk menjalin kerja sama internasional, terutama yang bersifat teknis dan non-politik, seperti di bidang pendidikan, budaya, teknologi, dan lingkungan.

Desentralisasi di Indonesia menjadi fondasi utama bagi berkembangnya praktik paradiplomasi melalui skema *sister city*, karena memberikan ruang kelembagaan dan wewenang administratif bagi pemerintah daerah untuk membangun jejaring global berdasarkan kebutuhan dan kepentingan lokal. Namun, pelaksanaan kerja sama luar negeri tetap dibatasi oleh prinsip satu kebijakan luar negeri nasional (*one foreign policy*) yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang datanya disampaikan dalam bentuk deskriptif, alami, dan tidak direduksi menjadi angka. Data dalam penelitian kualitatif dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau apa adanya, dengan penekanan pada makna, pemahaman, dan konteks sosial yang mendasari fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik ini dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif dari narasumber kunci yang terlibat langsung dalam kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kota Daejeon. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, namun tetap memberi ruang eksploratif bagi narasumber dalam menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka.

Untuk menjaga keabsahan data yang dikumpulkan, dilakukan *cross-check* atau triangulasi dengan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen resmi pemerintah yang dapat diakses secara publik. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, berita acara kerja sama, serta laporan hasil kegiatan yang berkaitan dengan paradiplomasi dan kerja sama luar negeri pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh melalui wawancara memiliki kesesuaian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Paradiplomasi dalam Perspektif Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Paradiplomasi bukanlah konsep yang lazim dikenal dalam praktik hubungan luar negeri di Indonesia. Namun demikian, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memaknai paradiplomasi sebagai bentuk kerja sama antar pemerintah daerah dengan kota atau lembaga asing di luar negeri. Pada awal perkembangannya di Indonesia sekitar tahun 1980-an, konsep ini dikenal

dengan istilah *mikrodiplomasi*, yang kemudian mengalami evolusi menjadi *paradiplomasi* sebagaimana dikenal saat ini.

Secara konseptual, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memahami paradiplomasi sebagai kerja sama internasional antarpemerintah daerah yang dibangun di atas tiga prinsip utama: pertama, adanya persamaan permasalahan; kedua, sumber daya yang berbeda namun bersifat saling melengkapi (*complementary*); dan ketiga, kesetaraan tingkat administratif antara pihak-pihak yang bekerja sama. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan bagi keterlibatan aktor subnasional, khususnya pemerintah daerah, dalam ranah hubungan internasional yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri.

Dalam konteks inilah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memanfaatkan peluang untuk menjalin kerja sama *sister city* dengan Pemerintah Kota Daejeon di Korea Selatan. Kemitraan ini tidak hanya merefleksikan dinamika diplomasi modern yang semakin inklusif terhadap aktor lokal, tetapi juga menunjukkan bagaimana paradigma kesetaraan dalam kerja sama lintas batas dapat diterapkan di tingkat kota.

Strategi Pengelolaan dan Implementasi Kerja Sama *Sister City*

Dalam pelaksanaan kerja sama dengan Kota Daejeon, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerapkan pendekatan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan (*equality*). Artinya, manfaat dari kerja sama tersebut tidak langsung dapat diukur sejak awal, melainkan akan muncul seiring dengan perkembangan kegiatan bersama yang bersifat progresif dan saling menguntungkan.

Secara makro, kerja sama tersebut telah menghasilkan beberapa capaian nyata. Kedua kota telah melakukan kunjungan timbal balik dalam rangka pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Salah satu contoh yang menonjol adalah ketika delegasi dari Tangerang Selatan melakukan studi banding ke Daejeon untuk mempelajari sistem inkubator riset yang dikembangkan di sana. Daejeon sendiri diketahui memiliki *science and technology park* yang dikelola oleh kementerian riset Korea Selatan, dan model ini menjadi perhatian penting bagi Tangerang Selatan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengadopsi konsep serupa dengan penyesuaian terhadap konteks lokal. Salah satu implementasinya adalah pendirian galeri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengadopsi konsep galeri UMKM di Daejeon. Namun, perlu ditekankan bahwa proses adopsi ini tidak dilakukan secara mentah, melainkan melalui proses adaptasi berdasarkan kondisi lokal. Bila Korea Selatan menitikberatkan inkubator risetnya pada penciptaan teknologi baru, maka di Tangerang Selatan fokusnya diarahkan pada pengembangan teknologi yang telah ada agar lebih optimal dan aplikatif di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan adanya proses *policy learning* yang kontekstual dan responsif terhadap perbedaan kapasitas serta tahapan pembangunan kedua negara.

Sejarah Awal Kerja Sama Kota Tangerang Selatan dan Daejeon

Inisiasi kerja sama antara Kota Tangerang Selatan dan Kota Daejeon bermula pada tahun 2015, saat Wali Kota Tangerang Selatan kala itu, Airin Rachmi Diany, menandatangani *letter*

of intent atau surat pernyataan minat kerja sama antara kedua kota. Momentum tersebut dilanjutkan pada tahun 2016 dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman di Tangerang Selatan, yang menjadi dasar resmi bagi kerja sama persahabatan kedua kota. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat tinggi nasional, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada hari yang sama, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Daejeon di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjanjian tersebut melibatkan sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Islam Negeri (UIN), dan Institut Teknologi Indonesia (ITI).

Kemitraan ini terus berkembang, dan pada tahun 2017, Pemerintah Kota Daejeon mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menyelenggarakan program pertukaran pemuda. Program ini memungkinkan pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk tinggal sementara di Daejeon guna melakukan penelitian sekaligus mempelajari kebudayaan lokal secara langsung.

Alasan dan Ruang Lingkup Kerja Sama Tangerang Selatan–Daejeon

Keputusan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menjalin kerja sama dengan Kota Daejeon dilatarbelakangi oleh kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah, khususnya pada masa awal pembentukan kota. Pada tahun 2015, usia Kota Tangerang Selatan baru mencapai tujuh tahun, yang pada saat itu masih berada dalam proses pencarian arah pembangunan dan identitas kota. Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan Kota Daejeon dianggap sebagai peluang untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan pusat riset dan inovasi.

Salah satu alasan utama di balik kerja sama ini adalah adanya ketertarikan bersama terhadap pengembangan pusat inkubasi riset. Daejeon, yang pada saat itu baru mulai mengembangkan pusat inkubasi, melihat Tangerang Selatan sebagai kota yang telah memiliki *science and techno park* lebih dahulu melalui Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK). Ketertarikan ini bersifat timbal balik, karena Tangerang Selatan juga ingin mempelajari pendekatan yang digunakan oleh Daejeon dalam mengelola pusat riset modern. Kendati demikian, dalam perkembangannya, pusat riset Daejeon tumbuh lebih cepat karena ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul, serta dukungan aktif dari pemerintah pusat dan institusi pendidikan tinggi di Korea Selatan. Sementara itu, di Indonesia, kolaborasi lintas sektor semacam ini masih menghadapi sejumlah hambatan struktural.

Selain bidang riset dan teknologi, ruang lingkup kerja sama ini juga mencakup aspek sosial dan budaya. Dalam ranah kebudayaan, diskusi antara kedua kota mengungkapkan perbedaan karakteristik budaya yang signifikan. Budaya populer Korea Selatan, seperti *K-*

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 9 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

pop, dinilai sebagian masyarakat di Daejeon tidak merepresentasikan nilai-nilai kultural lokal karena terlalu menormalisasi praktik operasi plastik dan menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis. Sebaliknya, budaya Indonesia cenderung diwariskan secara turun-temurun dan lebih organik. Perbedaan ini menjadi salah satu dasar kerja sama dalam bidang pertukaran budaya.

Daejeon yang relatif lebih tenang dan jauh dari kemodernan ekstrem seperti di Seoul, lebih menekankan pada pembangunan sektor riset dan pendidikan. Kota tersebut dikenal sebagai pusat pendidikan karena keberadaan berbagai institusi perguruan tinggi dan pusat inovasi. Hal ini memperkuat justifikasi kerja sama multisektoral yang disepakati oleh kedua pihak.

Secara keseluruhan, ruang lingkup kerja sama antara Kota Tangerang Selatan dan Kota Daejeon mencakup bidang-bidang berikut:

1. Pertukaran teknologi dan pengembangan *science and techno park*;
2. Bidang sosial, termasuk pendidikan, pertukaran kebudayaan, dan pembangunan sistem pelayanan perkotaan;
3. Bidang ekonomi, khususnya pengembangan ekonomi kreatif dan pertanian perkotaan;
4. Lingkungan hidup, meliputi pengelolaan sampah dan teknologi energi terbarukan;
5. Teknologi informasi dan komunikasi;
6. Sektor-sektor lain yang memungkinkan untuk dikembangkan melalui skema kerja sama lebih lanjut.

Bentuk Hubungan Kelembagaan dan Regulasi yang Berlaku

Struktur hubungan kelembagaan dalam kerja sama ini bersifat bilateral langsung antar pemerintah kota, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, ataupun sektor swasta. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan nasional yang berlaku di Indonesia, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah hanya dapat dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah asing atau lembaga setara di luar negeri. Oleh karena itu, kerja sama antara Tangerang Selatan dan Daejeon dilakukan secara langsung dalam bentuk kemitraan *sister city*.

Dampak Implementatif dan Tantangan Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama lintas negara oleh pemerintah daerah di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020. Peraturan ini menggarisbawahi bahwa kerja sama internasional oleh pemerintah daerah tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan praktis, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek politik dan keamanan nasional. Oleh karena itu, proses implementasi kerja sama harus dijalankan secara hati-hati dan tetap berada dalam kerangka kewenangan negara.

Dalam praktiknya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menghadapi sejumlah kendala dalam mengimplementasikan kerja sama ini secara optimal. Salah satunya adalah perbedaan ekosistem antara kedua kota, baik dalam hal regulasi, sumber daya, maupun dukungan antarsektor. Kendala lainnya meliputi keterbatasan dana dan kewenangan, khususnya dalam

sektor yang berada di bawah otoritas pemerintah pusat, seperti pendidikan. Misalnya, untuk mengadakan program pertukaran pelajar, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak dapat serta-merta mengirimkan peserta tanpa koordinasi dan persetujuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Walaupun demikian, upaya-upaya konkret tetap dilakukan untuk membawa dampak riil bagi masyarakat. Contohnya adalah adopsi sistem pertanian *vertical garden* sebagai bentuk adaptasi dari praktik pertanian urban di Daejeon. Tangerang Selatan, yang tidak memiliki banyak lahan pertanian, memilih fokus pada komoditas seperti anggrek yang bernilai ekonomi tinggi, dibandingkan padi yang tidak sesuai dengan kondisi geografis kota.

Strategi Keberlanjutan: Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Evaluasi

Agar kerja sama dapat berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menekankan pentingnya pemetaan urusan pemerintahan serta evaluasi berkelanjutan. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dari masing-masing perangkat daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi kerja sama. Contohnya, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan diidentifikasi memiliki pegawai dengan kapasitas tinggi karena telah banyak mengikuti pelatihan luar negeri. Namun, dari sisi infrastruktur, masih terdapat kekurangan.

Oleh karena itu, pemetaan diarahkan untuk menyusun prioritas kebutuhan, seperti peningkatan infrastruktur kesehatan. Temuan dari pemetaan ini kemudian dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, program kerja sama dapat diintegrasikan ke dalam anggaran dan kegiatan konkret, termasuk kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk fasilitasi pelatihan, seminar, dan penyusunan proyek.

Langkah-langkah tersebut bertujuan menjamin bahwa *Memorandum of Understanding* yang telah ditandatangani dapat dilanjutkan menjadi perjanjian-perjanjian kerja sama (*perjanjian kerja sama*) yang lebih operasional. Melalui pemetaan kebutuhan, perumusan bersama oleh para pemangku kepentingan, serta sistem *monitoring and evaluation* yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap kerja sama ini dapat menjadi efektif dan efisien serta memberi manfaat nyata bagi warganya.

Bentuk Kolaborasi di Bidang Lingkungan Berkelanjutan

Kerja sama Kota Tangerang Selatan dalam isu lingkungan berkelanjutan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, khususnya pada aspek sumber daya manusia. Untuk saat ini, kerja sama yang dijalankan lebih banyak melibatkan pihak ketiga dari dalam negeri. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengurangi emisi karbon dan pencemaran udara di wilayah perkotaan. Solusi yang diupayakan mencakup perencanaan penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (*Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum* atau SPKLU) di beberapa titik strategis, guna mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi berbasis listrik.

Di bidang pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini masih menjalankan pengelolaan secara mandiri, terutama dalam bentuk daur ulang sampah

menjadi energi listrik melalui teknologi *Solid Waste Power Plant* (SWPP) atau *Sampah Jadi Energi Listrik* (SPBL). Namun demikian, pendanaan proyek ini masih banyak bergantung pada investasi luar negeri karena keterbatasan anggaran daerah. Selain itu, sistem pengurangan sampah juga diadopsi dari Kota Banyumas, yang telah berhasil mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan sampah secara mandiri berkat kualitas sumber daya manusianya.

Adapun teknologi pembangkit listrik dari sampah yang saat ini digunakan oleh Kota Tangerang Selatan, sebagian besar diadopsi dari pemerintah kota di Tiongkok melalui skema investasi oleh sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak dilakukan secara langsung antara pemerintah kota, melainkan melalui jalur *business to business*.

Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Kerja Sama dengan Kota Daejeon

Terkait dengan kerja sama antara Kota Tangerang Selatan dan Kota Daejeon di Korea Selatan, pemerintah kota telah melakukan evaluasi secara berkala. Awalnya terdapat wacana untuk menghentikan kerja sama tersebut, namun pada akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan. Alasan utama kelanjutan kerja sama ini adalah karena kedua kota masih saling memberikan inspirasi, khususnya dalam hal inovasi dan pengembangan kebijakan publik. Selama kerja sama tetap berada dalam koridor hukum nasional Indonesia, maka kolaborasi semacam ini dianggap tetap relevan untuk dilanjutkan, meskipun belum menghasilkan proyek konkret.

Kerja sama tersebut cenderung bersifat simbolik dan inspiratif ketimbang implementatif. Dalam konteks ini, perbedaan kondisi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sistem pemerintahan antara kedua kota menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kerja sama yang bersifat operasional.

Tantangan Kerja Sama pada Bidang Budaya dan Birokrasi

Tantangan utama dalam kerja sama dengan Kota Daejeon, khususnya di bidang budaya dan birokrasi, tidak jauh berbeda dengan tantangan-tantangan umum lainnya dalam hubungan kerja sama internasional tingkat kota. Perbedaan sistem birokrasi, kebijakan, dan latar belakang sosial-budaya menjadi hambatan dalam menciptakan kerja sama yang efektif dan setara. Hal ini menunjukkan pentingnya sensitivitas antarbudaya dan fleksibilitas kebijakan dalam mendorong keberhasilan kerja sama paradiplomasi.

Efektivitas Kerja Sama dalam Mendukung Tujuan Paradiplomasi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menilai bahwa kerja sama yang telah dilakukan, termasuk dengan Daejeon, belum sepenuhnya ideal dalam mencapai tujuan utama paradiplomasi kota. Namun, kerja sama ini tetap dianggap sebagai proses pembelajaran jangka panjang. Menuju bentuk kerja sama yang ideal memerlukan komitmen berkelanjutan dari kedua belah pihak, baik di tingkat kota maupun negara. Selain itu, kondisi domestik Indonesia yang belum sepenuhnya stabil, khususnya dalam hal politik dan ekonomi, turut memengaruhi efektivitas kerja sama internasional serta arus investasi asing.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 9 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyadari bahwa menciptakan jejaring internasional yang kuat memerlukan waktu, sumber daya, dan arah kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, kerja sama paradiplomasi saat ini lebih difokuskan pada pemetaan sektor prioritas dan peluang kerja sama yang realistis serta berdampak nyata.

Rencana Ekspansi Kerja Sama Internasional Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki komitmen untuk memperluas jejaring kerja sama dengan kota-kota lain, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu kota yang sedang dipertimbangkan adalah Kota Miri di Malaysia, yang dikenal sukses dalam penerapan teknologi pertanian modern meskipun memiliki keterbatasan lahan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan tertarik untuk mempelajari inovasi tersebut karena relevansi dengan kondisi lokal. Selain itu, bidang pendidikan di Miri juga dinilai menarik, karena institusi pendidikan di sana mulai fokus pada pendekatan praktis yang dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia di Tangerang Selatan.

Namun demikian, semua rencana kerja sama akan didasarkan pada pemetaan kebutuhan dan urgensi. Misalnya, dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, solusi yang diprioritaskan adalah mengadopsi sistem transportasi umum dari DKI Jakarta, yang dinilai lebih cepat diterapkan, rendah biaya, dan memiliki hambatan komunikasi yang minimal. Dengan demikian, kerja sama internasional hanya akan difokuskan pada bidang yang berskala besar dan berbasis *business to business*.

Riwayat Kerja Sama Internasional Kota Tangerang Selatan

Selain Daejeon, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga pernah menjalin kerja sama dengan beberapa kota lain, antara lain Kathmandu di Nepal dalam bidang pengelolaan air limbah dan budaya, Frankfurt di Jerman, Timrå di Swedia, serta beberapa kota di Jepang dan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok secara khusus diketahui aktif memperluas pasar mereka melalui pendanaan pelatihan dan kerja sama teknis, yang menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi kota-kota mitra di Indonesia.

Peran Pemerintah dalam Kerja Sama antara Sektor Swasta

Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga mendukung kerja sama yang dilakukan oleh sektor swasta, selama proyek yang dijalankan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Contohnya, pengembangan kawasan oleh Sinar Mas Land di wilayah BSD City yang bekerja sama dengan pihak dari Jepang dalam bidang infrastruktur. Pemerintah tetap melakukan fungsi pengawasan dan perizinan, khususnya apabila proyek tersebut menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran air atau pelanggaran tata ruang. Komitmen antara sektor swasta, pemerintah kota, dan negara dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan menjadi prinsip utama dalam kerja sama semacam ini.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 9 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

2. Pembahasan

1) Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik paradiplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam kerja sama dengan Kota Daejeon belum sepenuhnya ideal, namun tetap memberikan kontribusi dalam penguatan kapasitas lokal melalui pertukaran pengetahuan dan inspirasi kebijakan. Hal ini selaras dengan argumen Keating (1999) yang menyatakan bahwa paradiplomasi lebih dari sekadar kerja sama administratif; ia merupakan upaya kolektif dari pemerintah daerah untuk menavigasi arena global demi kepentingan pembangunan lokal.
2) Secara teoretis, kerja sama ini mengandung unsur *policy learning* yang adaptif. Konsep ini dijelaskan oleh Dolowitz dan Marsh (2000) sebagai proses di mana suatu pemerintah mempelajari kebijakan dari yurisdiksi lain untuk diterapkan, baik secara penuh maupun adaptif. Dalam konteks Tangerang Selatan–Daejeon, adaptasi terjadi melalui pengadopsian program-program seperti galeri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pengembangan pertanian urban berbasis *vertical garden*. Namun demikian, keberhasilan pengadopsian sangat bergantung pada konteks lokal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, sebagaimana juga dicatat oleh Adinda dkk. (2020) bahwa rendahnya kapasitas teknis aparatur daerah menjadi kendala utama dalam kerja sama antarkota.
3) Di sisi lain, kerja sama ini bersifat *symbolic mutualism*, yakni hubungan yang didasarkan pada saling menginspirasi ketimbang pencapaian hasil konkret. Paradigma ini serupa dengan temuan Putri & Adnan (2017), yang menyebutkan bahwa sebanyak 70% kerja sama *sister city* di Indonesia bersifat simbolik karena miskomunikasi, minim tindak lanjut, serta absennya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Fakta bahwa kerja sama Tangerang Selatan dan Daejeon tetap berlanjut meskipun pernah direncanakan untuk dihentikan, menunjukkan bahwa keberlanjutan kerja sama sering kali lebih ditentukan oleh nilai diplomasi budaya dan hubungan interpersonal antarpihak, ketimbang indikator keberhasilan berbasis *output* kebijakan. Dalam aspek kelembagaan, bentuk kerja sama ini tetap mematuhi kerangka regulasi nasional seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2020, yang mewajibkan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah dilakukan secara *government to government*. Namun, dalam praktiknya banyak proyek dijalankan melalui skema *business to business*, terutama ketika melibatkan investasi dari negara seperti Tiongkok atau Jepang. Mukti (2013) menggarisbawahi bahwa fleksibilitas ini sering menjadi strategi alternatif pemerintah daerah dalam menyiasati keterbatasan legal-formal yang menghambat kerja sama langsung antarpemerintah.
4) Sementara itu, dalam sektor lingkungan hidup, Tangerang Selatan menerapkan pendekatan adopsi kebijakan domestik, misalnya sistem pengelolaan sampah dari Kota Banyumas, yang menunjukkan bahwa kerja sama luar negeri tidak selalu menjadi opsi utama. Strategi ini disebut *horizontal learning* atau pembelajaran horisontal, yakni praktik adopsi inovasi antar daerah dalam satu negara, yang menurut Anggia dkk. (2020) terbukti lebih efektif untuk kota-kota dengan kapasitas menengah karena hambatan komunikasi dan perbedaan budaya dapat diminimalkan. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam kerja sama pembangunan juga menguatkan temuan Albert dkk. (2018), bahwa kolaborasi

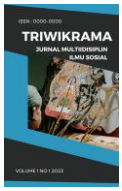

lintas sektor publik–swasta dapat meningkatkan keberlanjutan proyek paradiplomasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersikap suportif selama tidak ada dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan, menandakan adanya prinsip *precautionary governance* dalam mengelola risiko dari kerja sama swasta.

5) Akhirnya, temuan ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan kerja sama paradiplomasi tidak semata ditentukan oleh dokumen formal atau kesepakatan awal, tetapi oleh keberlanjutan proses pemetaan kebutuhan, adaptasi lokal terhadap praktik global, dan pengelolaan relasi antarlembaga dengan pendekatan yang kolaboratif dan realistis. Sebagaimana ditegaskan oleh Lecours (2008), paradiplomasi pada dasarnya merupakan refleksi dari dinamika aktor subnasional dalam menyiasati kompleksitas globalisasi untuk menjawab tantangan lokal secara lebih otonom.

PENUTUP

Kerja sama antara Kota Tangerang Selatan dan Kota Daejeon merupakan contoh nyata praktik paradiplomasi multi-sektor yang dijalankan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun belum sepenuhnya mencapai bentuk kerja sama yang ideal, kemitraan ini telah membuka ruang pembelajaran kebijakan, pertukaran pengetahuan, serta inisiasi proyek-proyek adaptif berbasis kebutuhan lokal. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama tersebut lebih bersifat simbolik dan inspiratif, daripada implementatif dan berbasis hasil konkret. Hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia, mekanisme birokrasi yang kompleks, dan dukungan kelembagaan yang belum kuat menjadi faktor penghambat utama dalam efektivitas kerja sama ini. Meski demikian, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap memandang hubungan ini sebagai bagian dari proses jangka panjang dalam membangun jejaring internasional yang berkelanjutan dan relevan dengan tujuan pembangunan lokal.

Berdasarkan hasil temuan, rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depan adalah sebagai berikut. Pertama, yang perlu diperbaiki adalah sistem koordinasi lintas sektor dan evaluasi internal terhadap program kerja sama agar tidak berhenti pada level simbolik. Harus ada mekanisme tindak lanjut dan integrasi program ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kedua, yang harus dipertahankan adalah komitmen terhadap pendekatan adaptif dan pembelajaran lintas kota, baik melalui kerja sama luar negeri maupun inovasi dari kota-kota dalam negeri yang sudah lebih dahulu berhasil. Ketiga, yang harus dievaluasi secara berkala adalah efektivitas pelibatan aktor-aktor non-pemerintah, seperti sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam mendukung kerja sama internasional agar manfaatnya lebih terasa langsung oleh masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, diharapkan praktik paradiplomasi Kota Tangerang Selatan ke depan dapat menjadi model kerja sama daerah yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga substansial dan berdampak nyata bagi pembangunan kota.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 9 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

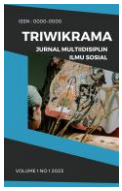

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan artikel penelitian ini dengan baik dan tepat waktu. Artikel yang berjudul *"Paradiplomasi Multi-Sektor dalam Kerja Sama Sister City: Studi Kasus Tangerang Selatan dan Daejeon"* merupakan bagian dari tugas proyek mata kuliah *Paradiplomasi dan Tata Kelola Multilevel*.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Laode Muhammad Fathun, selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan artikel ini.

Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Suprijar, Bapak Farhan Adli, dan Ibu Rina, selaku karyawan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi penting melalui wawancara dalam rangka pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini.

Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tersebut, artikel ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian paradiplomasi dan praktik kerja sama daerah di Indonesia.

REFERENSI

Adinda, M., Bainus, A., & Riswanda, D. (2020). Evaluasi kerjasama daerah Kota Bandung (Studi kasus *sister cities* antara Kota Bandung dan Kota Seoul). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 55–68.

Adinda, R., Maulana, H., & Setyawan, D. (2020). Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam kerja sama internasional: Studi pada kota-kota berkembang di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–59. https://doi.org/10.1234/jap.2020.1201

Albert, D. H., Santoso, A., & Irmawati, D. (2018). Human resources as a factor supporting the success of the cooperation "Sister City" Semarang-Brisbane. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 35–48.

Albert, R., Suryani, E., & Widodo, D. (2018). Sustainability of public-private partnerships in local diplomacy: Evidence from urban infrastructure projects in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 78–93. https://doi.org/10.5432/jkp.2018.0923

Anggia, D., Rohayatin, L., & Munawar, F. (2020). Strategi kerjasama *sister city* Kota Bandung dengan Petaling Jaya di bidang ekonomi perdagangan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(2), 140–154.

Anggia, Y., Nugroho, A., & Hafizh, M. (2020). Collaborative governance dalam implementasi *smart city* di Indonesia: Pembelajaran dari kerja sama kota Bandung dan Jepang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 112–130. https://doi.org/10.21009/jip.2020.15207

Bell-Souder, L., & Bredel, J. (1997). *Sister city relationships: Economic development and citizen diplomacy*. Sister Cities International.

Berridge, G. R. (1995). *Diplomacy: Theory and practice*. London: Palgrave Macmillan.

Clarke, N. (2009). *In the name of the city: Place branding and urban diplomacy in the global south*. New York: Routledge.

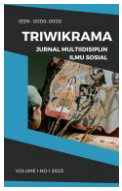

Cornago, N. (2010). *Diplomacy and paradiplomacy in the global arena: The growing relevance of local and regional actors*. New York: Palgrave Macmillan.

Dolowitz, D., & Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–24. https://doi.org/10.1111/0952-1895.00121

Duchacek, I. D. (1984). The international dimension of subnational self-government. *Publius: The Journal of Federalism*, 14(4), 5–31.

Gunartin. (2018). Analisa faktor-faktor kendala ketercapaian *smart mobility* dalam upaya menuju konsep *smart city* (Studi pada Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Teknologi dan Informatika*, 4(2), 67–75.

Keating, M. (1999). Regions and international affairs: Motives, opportunities and strategies. In F. Aldecoa & M. Keating (Eds.), *Paradiplomacy in action: The foreign relations of subnational governments* (pp. 1–16). London: Frank Cass.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Lecours, A. (2008). Political issues of paradiplomacy: Lessons from the developed world. *International Negotiation*, 13(1), 143–161. https://doi.org/10.1163/157180608X302702

Mukti, R. (2013). Paradiplomasi dan tantangan regulasi hubungan luar negeri pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), 89–104. https://doi.org/10.22146/jhi.2013.522

Nugent, N. (2003). *The government and politics of the European Union*. London: Palgrave Macmillan.

Putri, A. N., & Adnan, R. (2017). Evaluasi kegagalan kerja sama *sister city* di Indonesia: Studi pada kota mitra di Asia Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(3), 205–221. https://doi.org/10.20473/jisip.v21i3.2017.205-221

Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.

Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. London: Allen & Unwin.